

SOSIALISASI PILKADA 2024 UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK DAN PEMILU BERINTEGRITAS

Umar Wirahadi¹, Raden Minda Kusumah², Itto Turyandi³

¹Teknik Komputer, Fakultas Informatika, Politeknik Piksi Ganesha, ²Perekam Medis dan Informatika Kesehatan (RMIK), FKT, Universitas Bandung, ³Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Alghifari

umar@piksi.ac.id, minda2729@gmail.com, titotury86@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 yang melibatkan Forum Komunikasi Dosen (FKD) se-Jawa Barat menjadi wadah diskusi interaktif untuk membahas isu-isu penting terkait peningkatan partisipasi publik dan pemilu berintegritas. Dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dampak negatif praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi. Diskusi ini juga menghasilkan berbagai strategi solutif, seperti peningkatan literasi politik melalui peran dosen, penguatan pengawasan pemilu berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pelanggaran. Kolaborasi antara KPU, akademisi, dan masyarakat sipil diidentifikasi sebagai elemen kunci untuk mengatasi tantangan dalam Pilkada 2024. Dosen FKD berkomitmen memanfaatkan perannya sebagai pendidik untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi yang bersih kepada generasi muda. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar tindakan nyata dalam mendukung pemilu yang lebih transparan, partisipatif, dan bermartabat, sehingga memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pilkada 2024, Partisipasi Publik, Pemilu Berintegritas, Literasi Politik, Kolaborasi.

ABSTRACT

The 2024 Regional Election socialization activity involving the Forum of Lecturer Communication (FKD) of West Java served as an interactive platform to address critical issues related to increasing public participation and ensuring electoral integrity. With a keynote speaker from the General Election Commission (KPU) of Bandung City, participants gained in-depth insights into the adverse effects of money politics on the quality of democracy. This discussion resulted in several strategic solutions, such as enhancing political literacy through the role of lecturers, strengthening community-based election monitoring, and utilizing technology for reporting violations. The collaboration between KPU, academics, and civil society was identified as a key element in overcoming challenges in the 2024 Regional Elections. FKD lecturers committed to leveraging their role as educators to disseminate the values of clean democracy to younger generations. The outcomes of this activity are expected to serve as a foundation for concrete actions supporting more transparent, participatory, and dignified elections, thereby contributing positively to the sustainability of democracy in Indonesia.

Keywords: *2024 Regional Elections, Public Participation, Electoral Integrity, Political Literacy, Collaboration.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia adalah peristiwa penting yang tidak hanya menentukan arah kepemimpinan daerah tetapi juga menjadi ajang demokrasi Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh mekanisme teknis yang lancar, tetapi juga oleh kualitas partisipasi publik, terutama di kalangan generasi muda dan pemilih pemula (Fauziah, et al, 2024). Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan daerah melalui pemilu. Seperti yang diutarakan oleh Claudya et al (2023) ataupun BR Firman et al (2023) yang menyatakan masih rendahnya minat pemilih muda. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu elemen vital untuk memastikan partisipasi yang bermakna sekaligus mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Dosen sebagai salah satu pilar intelektual dalam masyarakat, memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Sebagai pendidik yang langsung berinteraksi dengan generasi muda di perguruan tinggi, dosen berada dalam posisi yang sangat efektif untuk memberikan edukasi politik (Gusty et al, 2023)(Hidayat, 2016). Melalui interaksi akademik di ruang kuliah, seminar, diskusi, dan kegiatan kampus lainnya, dosen dapat menyampaikan materi yang tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis mengenai peran mereka sebagai warga negara yang aktif ((Asri et al, 2022). Dalam konteks ini, dosen tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai inspirator yang membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu-isu politik, termasuk pentingnya partisipasi dalam Pilkada.

Edukasi yang diberikan oleh dosen meliputi berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang sistem politik dan mekanisme pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, hingga pentingnya memilih calon pemimpin yang memiliki visi dan integritas. Dengan pendekatan dialogis dan berbasis fakta, dosen dapat membangun diskursus yang mendalam mengenai dampak keputusan politik terhadap kehidupan masyarakat, sehingga mahasiswa mampu melihat Pilkada sebagai momentum untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di daerah mereka.

Forum Komunikasi Dosen (FKD) berperan sebagai katalisator dalam mendukung gerakan edukasi politik ini. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi Pilkada 2024, FKD memberikan ruang bagi dosen untuk berkolaborasi dan berbagi strategi dalam menyampaikan pendidikan politik yang relevan dan kontekstual. FKD juga menjadi wadah penting untuk merancang program-program berbasis kampus seperti seminar politik, simulasi pemilu, dan lokakarya kepemimpinan yang dirancang khusus untuk generasi muda. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan berintegritas, sehingga mampu memilih berdasarkan pertimbangan rasional dan bukan sekadar pengaruh emosional atau tekanan sosial.

Lebih jauh, dosen juga memiliki peran dalam meluruskan informasi yang salah dan membangun literasi digital, terutama dalam menghadapi tantangan era post-truth dan maraknya berita palsu terkait Pilkada (Duryat, 2021). Edukasi politik yang diberikan oleh dosen tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima (Lupia, 2016). Dengan pendekatan ini, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda tidak hanya menjadi peserta Pilkada yang aktif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke lingkungannya.

Dengan sinergi antara dosen, FKD, dan penyelenggara Pilkada, diharapkan sosialisasi Pilkada 2024 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar berkontribusi dalam mencetak generasi yang sadar politik, partisipatif, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia tidak hanya berlanjut, tetapi juga berkembang menuju arah yang lebih baik.



Gambar 1. Pemberian piagam penghargaan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bandung

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis untuk memastikan keberhasilan sosialisasi Pilkada 2024. Kegiatan diawali dengan komunikasi intensif dengan pengurus Forum Komunikasi Dosen (FKD) se-Jawa Barat. Tahapan ini bertujuan untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan pentingnya kegiatan sosialisasi serta memastikan partisipasi aktif dosen sebagai peserta. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan daring, email, dan grup diskusi yang menjadi saluran resmi FKD.

Setelah itu, disusun surat undangan resmi yang ditujukan kepada seluruh dosen FKD. Persiapan surat ini melibatkan penulisan undangan yang mencantumkan detail kegiatan seperti tema, waktu, lokasi, dan agenda acara. Surat tersebut kemudian didistribusikan melalui email dan grup komunikasi untuk menjangkau semua calon peserta. Persiapan tempat kegiatan menjadi langkah berikutnya. Lokasi dipilih di sebuah hotel yang terintegrasi dengan mall di tengah Kota Bandung. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan kenyamanan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat. Koordinasi dilakukan dengan pihak hotel untuk memastikan ketersediaan ruang acara yang memadai, termasuk fasilitas pendukung seperti tata suara, proyektor, dan akses internet. Kebutuhan konsumsi, perlengkapan peserta, dan sertifikat juga disiapkan untuk mendukung kelancaran acara.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan rundown acara yang mencakup pembukaan, penyampaian materi oleh narasumber, sesi diskusi interaktif, dan penutupan. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, yang akan memberikan paparan mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkada 2024 serta nilai-nilai integritas dalam proses demokrasi.

Kegiatan inti dimulai dengan pembukaan oleh Ketua FKD Jawa Barat dan panitia penyelenggara, diikuti dengan penyampaian materi oleh narasumber. Selama sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi melalui sesi tanya jawab yang dirancang untuk menggali pemahaman lebih mendalam terkait teknis pemilu dan strategi peningkatan partisipasi publik. Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, sesi tanya jawab tersebut juga menjadi alat untuk menilai efektivitas penyampaian materi. Selain itu, kuesioner diberikan kepada peserta untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan mereka terhadap kegiatan. Masukan dan saran dari peserta diharapkan dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas kegiatan serupa di masa mendatang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 yang melibatkan dosen-dosen dari Forum Komunikasi Dosen (FKD) se-Jawa Barat menghasilkan beberapa temuan penting, terutama terkait diskusi interaktif mengenai isu *money politics* yang kerap mencoreng integritas pemilu. Melalui paparan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, peserta mendapatkan gambaran jelas tentang fenomena ini, termasuk bagaimana praktik politik uang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan mencederai prinsip keadilan dalam Pilkada. Dalam diskusi, peserta mengidentifikasi bahwa praktik *money politics* sering muncul karena rendahnya literasi politik masyarakat, tekanan ekonomi, serta budaya pragmatisme dalam memilih pemimpin. Hal ini pun didukung oleh temuan dari beberapa penelitian sebelumnya (Heryanto, 2019)(Permatasari, 2022). Hal ini pun menjadi bagian dari paradoks demokrasi di Indonesia (Mahendra, 2021). Keadaan ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan Pilkada yang berintegritas, terutama di wilayah yang

memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah dan ketimpangan informasi terkait proses pemilu.



Gambar 2. Salah satu peserta mengajukan pertanyaan kepada narasumber

Dari hasil diskusi, beberapa strategi untuk mengatasi isu *money politics* berhasil dirumuskan. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan literasi politik masyarakat melalui kampanye pendidikan politik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, dan organisasi masyarakat. Dosen sebagai agen edukasi diusulkan untuk mengintegrasikan materi literasi politik ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami sistem pemilu secara teknis tetapi juga memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu yang merusak demokrasi.

KPU Kota Bandung juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan pemilu, baik melalui mekanisme formal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun melalui partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini, peserta sosialisasi memberikan masukan agar pengawasan berbasis komunitas diperkuat dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang diidentifikasi adalah resistensi dari kelompok tertentu yang telah terbiasa dengan pola politik uang. Untuk menghadapi hal ini, strategi komunikasi persuasif dianggap penting. Dosen FKD menyarankan pendekatan komunikasi yang berbasis pada nilai-nilai moral dan agama, yang disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat lokal. Kampanye anti-*money politics* melalui media sosial juga diusulkan untuk menjangkau generasi muda yang lebih banyak mengakses informasi secara digital.

Sebagai hasil dari evaluasi diskusi, peserta menyepakati bahwa keberhasilan strategi-strategi ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara Pemerintah, KPU, akademisi, dan masyarakat sipil. Melalui kegiatan sosialisasi ini, dosen FKD berkomitmen untuk menjadi katalisator perubahan dengan memanfaatkan platform pendidikan dan jejaring akademik untuk menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi yang bersih dan berintegritas. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa diskusi interaktif tidak hanya memberikan pemahaman baru kepada peserta tetapi juga melahirkan gagasan-gagasan konstruktif untuk mengatasi tantangan besar dalam Pilkada 2024. Implementasi hasil diskusi ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya pemilu yang lebih transparan, adil, dan bermartabat.

D. SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 yang melibatkan Forum Komunikasi Dosen (FKD) se-Jawa Barat berhasil menjadi wadah diskusi interaktif yang membahas isu-isu krusial, seperti praktik money politics dan tantangan dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Melalui paparan narasumber dari KPU Kota Bandung, peserta mendapatkan wawasan mendalam tentang dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi. Diskusi ini menghasilkan berbagai strategi, seperti peningkatan literasi politik melalui peran dosen, penguatan pengawasan pemilu berbasis komunitas, dan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan pelanggaran.

Kolaborasi antara KPU, akademisi, dan masyarakat sipil dianggap sebagai kunci utama untuk mengatasi tantangan dalam Pilkada 2024. Dosen FKD berkomitmen untuk memanfaatkan perannya sebagai pendidik dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi yang bersih kepada generasi muda. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk tindakan nyata yang mendukung pemilu yang lebih transparan, partisipatif, dan bermartabat, sehingga memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Y. N., Alti, R. M., Rizqi, V., Rismawati, E., Gatriyani, N. P., Amarulloh, R. R., ... & Zulaiha, F. (2022). Model-Model Pembelajaran. Haura Utama.
- BR, E. J., Firman, A., Surbakti, F. A., & Hutapea, D. J. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 5(4).
- Claudya, S. E., Cahyani, N., Togatorop, I. H., Tjahyadi, E. A., Andini, M., Marsevani, M., ... & Sakti, W. L. (2023, September). Peran Bawaslu dan Mahasiswa Universitas Internasional Batam dalam Membangun Sifat Partisipatif Pemilu kepada Pemilih Pemula SMA Negeri 24 Batam. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 5, No. 1, pp. 644-650).
- Duryat, D. H. M. (2021). Potret Buram Politik Kekuasaan: Telaah terhadap Persoalan Politik, Pendidikan dan Kebijakan Keagamaan di Indonesia. Penerbit K-Media.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51-75.
- Gusty, S., Hidayat, A., Tandungan, E. S., Tikupadang, W. K., Ahmad, S. N., Tumbo, A., ... & Gustang, A. (2023). Merayakan Kemerdekaan (Refleksi Dosen dalam Membangun Generasi Penerus Bangsa). TOHAR MEDIA.
- Heryanto, G. G. (2019). Literasi Politik. IRCiSoD.
- Hidayat, U. S. (2016). Model-Model Pembelajaran Efektif. Bina Mulia Publishing.
- Lupia, A. (2016). *Uninformed: Why people know so little about politics and what we can do about it*. Oxford University Press.
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 27-47.
- Permatasari, Y. (2022). Insecurisme Politik Rakyat Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Populika*, 10(1), 10-23.